

Upaya Pemerintah RI Meningkatkan Pendapatan Nasional

Alfiya Nur Khasanah¹, Hendra Riofita²

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: alfianurkhasanah17@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara dan kinerja perekonomiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan mengkaji berbagai literatur, data, dan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta reformasi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan fiskal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih efektif melalui penguatan sistem perpajakan, peningkatan investasi sumber daya manusia, dan digitalisasi sektor UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Pendapatan Nasional, Kebijakan Fiskal, Pembangunan Ekonomi, UMKM, Redistribusi Pendapatan*

Abstract

This study aims to analyze the strategies and policies implemented by the Government of the Republic of Indonesia in an effort to increase national income. National income is an important indicator in assessing the level of welfare of a country and its economic performance. The method used in this study is library research, by reviewing various relevant literature, data, and policies. The results of the study show that the government has made various efforts such as infrastructure development, empowerment of MSMEs, industrial downstreaming, increasing investment, and reforming fiscal and monetary policies. In addition, the government is also implementing a post-pandemic national economic recovery (PEN) program to maintain economic stability. However, challenges such as economic inequality, commodity price fluctuations, and fiscal limitations are still obstacles. Therefore, a more effective income redistribution policy is needed through strengthening the taxation system, increasing investment in human resources, and digitalizing the MSME sector. This study concludes that synergy between the government, private sector, and society is the key to success in increasing national income sustainably.

Keywords: *National Income, Fiscal Policy, Economic Development, Msmes, Income Redistribution*

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ekonomi nasional merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, dengan semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di dalam suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin besar juga pendapatan nasional negara tersebut. Dan kesejahteraan masyarakat

dapat diketahui dari dengan melihat pertumbuhan pendapatan nasionalnya Indonesia merupakan negara berkembang, namun memiliki permasalahan yang begitu besar yaitu kesenjangan dan ketimpangan dalam ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu pada pendapatan. Disparitas pendapatan merupakan aspek yang umum terjadi pada suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedang dan rendah serta masalah pembangunan ekonomi antar daerah yang tidak merata. Namun ketimpangan pendapatan ini akan menimbulkan perekonomian yang tidak maksimal, kebersamaan antar sesama masyarakat akan menurun, yang lebih buruknya lagi akan menimbulkan kriminalitas. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah dapat difungsikan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan penerimaan tenaga kerja.³ Bhima Yudhistira memberikan gambaran mengenai belanja negara pada tahun 2022 yaitu mencapai 90% dari target 100%, dengan 90% tersebut diperkirakan masih belum cukup untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, peran aktif pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter yang tepat menjadi sangat krusial. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran negara, termasuk dalam hal pembelanjaan dan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perluasan lapangan kerja. Semua upaya tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan produktivitas nasional dan pada akhirnya berdampak pada naiknya pendapatan nasional. Selain itu, dalam era globalisasi saat ini, keterbukaan ekonomi juga menjadi faktor yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional, investasi asing, dan kerja sama antar negara dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional apabila dikelola secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. (Sri Kasnelly, Muhammad Said, 2023)

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pendapatan nasional melalui berbagai strategi dan kebijakan. Salah satu fokus utama adalah mendorong konsumsi domestik dan investasi. Pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,82 persen, sementara investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 4,40 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sektor investasi. Di sisi produksi, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96 persen pada tahun 2023, diikuti oleh sektor jasa lainnya yang tumbuh 10,52 persen, serta akomodasi dan makanan minuman yang meningkat 10,01 persen. Sektor industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. (Dinda Septiana, Hendra Riofita, 2024)

Pemerintah juga terus meningkatkan belanja negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah mencapai 102,09 miliar dolar AS, meningkat dari 101,35 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Peningkatan belanja ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Namun, tantangan tetap ada. Penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit pada tahun 2023 berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi industri dan diversifikasi produk ekspor. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan iklim investasi. Berbagai reformasi struktural dilakukan untuk mempermudah perizinan

usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat infrastruktur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dengan terus mendorong konsumsi domestik, investasi, dan diversifikasi ekonomi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik

METODE

Dalam metode pengumpulan data-data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode perpustakaan (*library research*) dengan mengambil data berupa tulisan dari buku-buku terdahulu atau penulisan-penulisan sebelumnya yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah RI Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia, peningkatan pendapatan nasional menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan nasional, baik dari sektor produksi, konsumsi, investasi, maupun ekspor-impor. Upaya tersebut melibatkan berbagai kebijakan ekonomi makro dan mikro yang saling terintegrasi.

Salah satu upaya paling signifikan adalah pembangunan infrastruktur secara masif. Pemerintah melalui program National Strategic Projects (Proyek Strategis Nasional) membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, serta jaringan listrik dan internet ke pelosok daerah. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang meningkat otomatis akan mendorong kegiatan produksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional secara keseluruhan

Selain infrastruktur, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi di sektor pendidikan dan pelatihan vokasi. Program seperti Kartu Prakerja, bantuan pendidikan tinggi (KIP-Kuliah), dan penguatan link-and-match antara dunia pendidikan dan dunia kerja merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil dan produktif. Tenaga kerja yang kompeten akan mendorong produktivitas nasional dan memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi, seperti industri manufaktur dan teknologi informasi

Dalam sektor industri, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mendorong pengolahan di dalam negeri. Contoh nyata adalah kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan pembangunan smelter untuk mengolah nikel menjadi produk turunan seperti baterai kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menambah kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, dan pelatihan manajemen usaha disediakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Dengan kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap PDB, penguatan sektor UMKM menjadi langkah strategis dalam memperluas basis ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan nasional dari akar rumput

Dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menekan inflasi, serta menjaga nilai tukar rupiah agar tetap kompetitif. Stabilitas ini penting bagi dunia usaha karena memberikan kepastian dalam berinvestasi dan memproduksi. Di samping itu, pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, digitalisasi sistem pajak, dan ekstensifikasi pajak terhadap sektor-sektor ekonomi digital dan informal. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor eksternal, pemerintah juga memperluas kerja sama perdagangan internasional melalui perjanjian seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan FTA (Free Trade Agreement). Akses pasar yang lebih luas mendorong ekspor barang dan jasa Indonesia ke berbagai negara, meningkatkan surplus neraca perdagangan, dan menambah devisa Negara. Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional mencerminkan pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Meski tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan fluktuasi global masih membayangi, arah kebijakan yang diambil menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pendapatan nasional Indonesia diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Efektivitas Redistribusi Pendapatan Nasional

Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan redistribusi merupakan langkah krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Dina Amanda, Hendra Riofita, 2024). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain, implementasi, dan konteks sosial ekonomi yang spesifik. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas redistribusi pendapatan:

1. Peningkatan Targetedness dan Akurasi

Program Salah satu kunci keberhasilan program redistribusi adalah kemampuan untuk menargetkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan kualitas data penerima manfaat melalui basis data yang terintegrasi dan sistem verifikasi yang ketat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti big data dan artificial intelligence dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang rentan dan mengoptimalkan penyaluran bantuan.

2. Perluasan Cakupan dan Diversifikasi Program

Program redistribusi perlu terus diperluas cakupannya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, diversifikasi jenis bantuan juga penting, tidak hanya berupa transfer tunai tetapi juga dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

3. Penguatan Sistem Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan instrumen penting dalam meredistribusikan pendapatan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya untuk memperluas basis pajak, meningkatkan tarif pajak bagi kelompok berpendapatan tinggi, dan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perpajakan untuk menghilangkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak.

4. Investasi dalam Sumber Daya Manusia

Investasi dalam sumber daya manusia merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan layanan kesehatan.

5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas

Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program redistribusi. Sederhana birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

6. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program redistribusi. Pembentukan satu pintu layanan untuk mengakses berbagai program bantuan sosial dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi.

Pengaruh PPN terhadap Pendapatan Nasional

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan nasional di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Melalui beberapa mekanisme yang kompleks dan interaktif, PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara ini. Berikut adalah analisis yang lebih rinci berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan: Pertama, PPN berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Namun demikian, peningkatan tarif PPN juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang disoroti oleh Siregar (2018), peningkatan PPN berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi agregat. Ini disebabkan oleh potensi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Penurunan konsumsi ini kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB negara. Dampak sosial ekonomi dari peningkatan PPN juga perlu diperhatikan.

Meskipun PPN dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan penerimaan negara, tetapi Suryani (2016) menunjukkan bahwa ada dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dampak ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin (Novianto et al., 2023). Kenaikan tarif PPN dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari PPN, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian, seperti dalam pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial. Namun, penelitian oleh Siregar (2018) juga menyoroti bahwa peningkatan PPN berpotensi meredam pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan adanya trade-off antara peningkatan pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Pengaruh PPN terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian penting. Peningkatan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi daya beli masyarakat melalui peningkatan harga barang dan jasa. Suryani (2016) menyatakan bahwa meskipun PPN memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan nasional, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menjadi negatif. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang hati-hati dalam menetapkan tarif PPN, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Julito & Ramadani, 2024). Secara keseluruhan, pengaruh PPN terhadap pendapatan nasional di Indonesia adalah kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan pemerintah, namun juga dapat berpotensi meredam pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang baik dalam kebijakan perpajakan untuk memastikan bahwa PPN berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Natalia & Fajriana, 2023).

Langkah Yang Diambil Pemerintah Agar Pendapatan Nasional Di Indonesia Kembali Stabil

Terdapat beberapa langkah yang diambil pemerintah agar pendapatan nasional di Indonesia kembali stabil yaitu :

1. Pemerintah menerapkan program baru yaitu PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)

PEN merupakan program yang direncanakan oleh presiden Joko Widodo dan ketua dalam program PEN adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto. Tujuan program PEN dibentuk adalah untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam mendukung UMKM di Indonesia pemerintah membuat program Subsidi Bunga Ultra Mikro yang bertujuan memberikan kelonggaran kepada UMKM dalam membayar angsuran dan bunga kredit.⁹ Dalam program Subsidi Bunga Ultra Mikro, UMKM akan mendapatkan fasilitas dalam penundaan bayaran cicilan yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah juga menjaga agar skema penyaluran UMKM dapat disalurkan secara tepat dan sesuai dengan sasaran. Pemerintah juga memberikan solusi pembaruan untuk UMKM di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran dalam memberikan pembaruan kepada para UMKM dengan memperbarui pasar tradisional menuju pasar online, hal tersebut dilakukan karena pasar online dapat membuat UMKM tetap menjalankan usahanya dan tetap dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional karena sektor ini sangat memengaruhi perekonomian negara. Dalam program PEN, pemerintah mendorong UMKM di Indonesia untuk memasukan usahanya melalui go digital melalui program yang dibentuk pemerintah yaitu Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Program tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar UMKM di Indonesia mampu beradaptasi di dunia digital

2. Pemerintah melakukan pembiayaan terhadap korporasi dengan memberikan dukungan berbentuk modal kerja

Dukungan biaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembiayaan terhadap korporasi khususnya yang merupakan padat karya mencapai Rp 53,57 triliun dan pemerintah juga memberikan intensif pajak, misalnya adalah pemerintah menanggung pajak penghasilan. Usaha pemerintah dalam memberikan dukungan berbentuk modal kerja kepada para usaha korporasi merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian di Indonesia melalui peminjaman atas kredit modal kerja dan diharapkan usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional

3. Pemerintah menempatkan dana negara kepada bank umum yang tergabung dalam Himbara di Indonesia

Dana negara akan ditempatkan kepada bank umum Himbara (Himpunan bank milik negara) yaitu bank mandiri, bank BRI, bank BNI, dan bank BTN. Menempatkan dana di dalam bank umum Himbara bertujuan untuk mendukung ekonomi sektor riil di Indonesia dan memutar roda ekonomi di Indonesia. Dengan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan mampu memulihkan dan menstabilkan perekonomian Indonesia di masa pasca pandemi, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

SIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan pendapatan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, hilirisasi industri, serta reformasi kebijakan fiskal dan moneter. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendapatan nasional yang meningkat mencerminkan adanya

peningkatan produktivitas, perluasan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, fluktuasi harga komoditas global, dan keterbatasan fiskal masih menjadi hambatan yang harus terus diatasi. Kebijakan redistribusi pendapatan seperti subsidi, pajak progresif, dan investasi dalam sumber daya manusia menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Muhammad Rizki Nazala, Bima Nugroho, Hanna Meitha Maryama, & Mukhayatul Khamdillah. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 40–49.
- Basuki, B., & Suwarno, N. (2021). Teknologi Digital Memediasi Dampak Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Umkm Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(3), 300-320
- Halim, Abdul. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol 2 (1). Online.
- H Riofita - Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015
- Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.
- Nuryani. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Skripsi
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 187–195.
- Hendra Riofita. Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 2, 2024: 137–151*
- Hendra Riofita. Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016
- Hendra Riofita. Augmenting Islamic Digital Payment Effect On Muslim Customer Purchase Decision On Micro, Small And Medium Enterprises' (Msmes) Products. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 10, No. 4 (2024), pp. 735 – 758
- Hendra Riofita, (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, vol 2, no 1.
- Sri Kasnelly, Muhammad Said, Upaya Pemerintah Ri Meningkatkan Pendapatan Negara. *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah e- ISSN: 2798-8694, p-ISSN: 2807-128X Volume 3, Edisi I (Juli 2023)*
- Zainal, Habil dkk. 2021. “Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Masa Pasca Pandemi”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 4 (2).